



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Agustus 2023

Halaman: 3

► USAHA PERPARKIRAN

Pajak Tempat Parkir 20% Bebani Pengusaha

JOGJA—Dinas Perhubungan (Dishub) DIY akan membongkar area parkir Abu Bakar Ali (ABA) untuk dijadikan ruang terbuka hijau pada 2025. Sebagai gantinya, Dishub meminta warga yang memiliki lahan luas dan pihak swasta lainnya untuk membuka parkir di sekitar Malioboro.

Imbauan ini ditanggapi pengelola parkir swasta, baik yang berbadan hukum perusahaan maupun perorangan. Mereka menilai pajak yang dibebankan terlalu tinggi yakni 20%.

Perusahaan swasta penyedia jasa parkir, Java Parking menilai pajak 20% tidak rasional. "Idealnya bagi kami lima persen, 20 persen itu terlalu besar karena tidak mempertimbangkan operasional, gaji karyawan, dan pengeluaran lainnya," kata staf operasional Java Parking, Toni Sutrisno saat ditemui, Jumat (4/8).

Toni menjelaskan jajarannya kerap memohonkan keringanan pajak ke Pemkot Jogja agar tidak terlalu terbebani. "Pajak 20 persen bagi kami terlalu berat, kami tidak mendapat keuntungan," katanya.

Java Parking memiliki lima tempat parkir yang dikelola yakni di Sleman, Bantul, dan Kota Jogja. "Semua besaran pajaknya sama, kami juga harus menggaji karyawan, termasuk tunjangan dan asuransi kesehatan," ujarnya.

Tak hanya perusahaan parkir swasta, pengelola parkir perseorangan juga keberatan dengan pajak tersebut. Salah satunya pengelola parkir Komplek Zaman Edan yang berada di Jl. Marga Utama, Akhmad Fauzi. "Saya kemarin mengurus izin, saat dikasih tahu pajaknya 20 persen langsung kaget," katanya, Jumat siang.

Fauzi mengakui pemerintah memberikan bantuan perizinan tapi menyayangkan besaran pajak yang diterapkan. "Masalahnya bukan perizinan tetapi pajaknya, 20 persen ini tidak masuk akal. Kami juga perlu memperbaiki lahan, gaji karyawan dan lainnya," katanya.

Pengurusan izin Parkir Komplek Zaman Edan, menurut Fauzi, masih menggantung karena belum ada solusi soal pajak. "Kami masih koordinasi dengan pemilik lahan, bagaimana solusinya kalau pajaknya 20 persen," katanya. Selama belum ada solusi soal pajak, Parkir Komplek Zaman Edan belum akan melanjutkan pengurusan izin.

(Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005